



DINAMIKA HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Imam Hafizar Rifki^{a*}

^a Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam / Aqidah dan Filsafat Islam, email Imamhafizar12@gmail.com Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara

* korespondensi

ABSTRACT

The relationship between Islam and the state in Indonesia is a crucial issue in the history of Islamic political thought. As a country with a Muslim-majority population, Indonesia faces the challenge of integrating Islamic values with a modern governance system based on Pancasila. This article examines the dynamics of the relationship between Islam and the state in Indonesia, focusing on the thoughts of Islamic scholars, the role of the Jakarta Charter, and the implementation of Islamic values in a pluralistic national context. This study employs a literature review method, analyzing books, articles, and previous research. The findings reveal that the relationship between Islam and the state in Indonesia is dynamic, where Islam can contribute as a source of ethical values without being formalized. In conclusion, this dynamic reflects the efforts of Muslims to balance religious identity with national needs, thereby strengthening national unity and contributing positively to the nation's development.

Keywords: Islam and state, Islamic political thought, pluralism, national unity

Abstrak

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia merupakan salah satu isu penting dalam sejarah pemikiran politik Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan sistem pemerintahan modern berbasis Pancasila. Artikel ini menganalisis dinamika hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, dengan fokus pada pemikiran para tokoh Islam, peran Piagam Jakarta, dan implementasi nilai-nilai keislaman dalam konteks negara pluralis. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, termasuk analisis terhadap buku, artikel, dan penelitian sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan Islam dan negara di Indonesia bersifat dinamis, di mana Islam dapat berkontribusi sebagai sumber nilai etika tanpa harus diwujudkan secara formalistik. Kesimpulannya, dinamika ini mencerminkan upaya umat Islam untuk menyeimbangkan identitas agama dengan kebutuhan kebangsaan, sehingga mampu memperkuat persatuan nasional dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

Kata Kunci: Islam dan negara, pemikiran politik Islam, pluralisme, persatuan nasional

1. PENDAHULUAN

Wacana politik yang paling umum di kalangan umat Islam, khususnya dari abad ke-19 hingga abad ke-21, adalah tentang hubungan antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara selalu menjadi faktor yang instruktif bagi para sarjana politik Islam. Secara global, ada tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan: Aliran pertama adalah bahwa Islam adalah agama yang komprehensif yang menjunjung tinggi hak-hak semua manusia. ketatanegaraan, misalnya. Karena Nabi Muhammad SAW bukan kepala negara, maka tidak ada kaitan antara Islam dan ketatanegaraan, padahal Islam adalah agama di Barat. Selain itu, saya hanyalah seorang hamba Allah SWT yang taat. Ketiga, aliran ketiga ini menunjukkan

Pemikiran tentang keterkaitan antara agama dan negara telah menjadi topik yang sangat diminati oleh masyarakat Muslim, khususnya sejak abad ke-19 hingga abad ke-21. Diskursus mengenai hubungan agama dan negara terus menjadi perhatian utama bagi para pemikir politik Islam [1]. Bahwa Islam merupakan agama yang sudah lama berdiri, namun juga menunjukkan tidak adanya hubungan erat antara Islam dan ketatanegaraan; disebutkan bahwa terdapat tata nilai etika tersendiri dalam bernegara kehidupan dalam Islam. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan peran Islam dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial menjadi semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menjalin hubungan yang baik. memungkinkan komunikasi antara Islam dan negara. Oleh karena itu, masalah ini sering kali menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu ada kekhawatiran kalau pemikiran tentang Islam dan negara ini telah dibahas dan diperdebatkan oleh para sarjana sejak awal hubungan antara Islam dan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, wawasan utama zaman ini adalah bahwa zaman ini ditandai dengan permusuhan dan kekayaan.

Hubungan yang tidak mesra terutama, tapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan konstitusi Negara Republik Indonesia yang banyak diabaikan oleh umat Islam dalam penyelenggaraan negara. Indonesia adalah negara baru. Salah satu pertanyaan terpenting dalam perbedaan yang ditunjukkan di atas adalah apakah negara ini “Islam” atau “nasionalis”. Islam harus dipahami dan dijunjung tinggi sebagai ideologi penuntun bangsa, sesuai dengan konstruksi kenegaraan yang pertama. Sebaliknya, keduanya mendesak membangun kenegaraan sedemikian rupa sehingga bangsa ini berlandaskan Pancasila sebagai ideologi nasionalnya. Menurut Munawir Sjadzali, Islam dan bangsa tidak ada hubungannya; Madinah yang dianggap oleh umat Islam sebagai Konstitusi tidak mengacu pada agama bangsa. Piagam Madinah hanya disebutkan sebagai Landasan bermasyarakat tidak dimaksudkan untuk mendirikan suatu negara; Muhammad SAW misalnya, tidak secara tegas menyatakan bahwa Madinah adalah sebuah bangsa. Ketaatan Muhammad Tahir Azhari terhadap ideologi bangsa. Menurut prinsip yang lebih mendasar, konsep Islam sebagai sebuah bangsa merupakan distorsi [2].

Terhadap hubungan yang semestinya antara agama dan negara. Negara merupakan salah satu aspek kehidupan duniawi yang bercirikan rasionalisme dan kolektif, sedangkan agama adalah cara hidup yang bersifat pribadi dan spiritual. Lebih lanjut, Bahtiar Effendy menyatakan bahwa di Indonesia, Kuatnya permusuhan politik antara Islam dan negara disebabkan oleh cita-cita dan aktivitas politik Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip formalistik dan legalistik. Idealisme dan aktivisme politisi Muslim yang didasarkan pada formalitas dan hukum, menangkalkan hubungan politik yang sulit antara Islam dan negara. Indonesia. Saya berpendapat dengan menggunakan gagasan bahwa transformasi intelektual mungkin merupakan sikap negara terhadap politik Islam secara umum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemikiran politik Islam merupakan elemen penting dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para intelektual dan ulama Islam berkontribusi secara signifikan dalam membentuk perspektif serta menentukan arah kebijakan politik di tengah Masyarakat [3]. Hubungan antara Islam dan negara telah menjadi salah satu wacana politik paling penting dalam sejarah pemikiran Islam, terutama sejak abad ke-19. Perdebatan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keislaman dengan sistem pemerintahan modern. Secara global, para sarjana mengidentifikasi tiga aliran utama terkait hubungan ini. Aliran pertama menganggap Islam sebagai agama yang komprehensif, mencakup aspek spiritual, sosial, dan politik, yang menjunjung tinggi hak-hak manusia. Aliran kedua memisahkan Islam dari ketatanegaraan, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih merupakan pemimpin spiritual daripada kepala negara. Aliran ketiga menekankan bahwa meskipun Islam memiliki nilai-nilai etika yang relevan dengan kehidupan bernegara, ia tidak secara eksplisit mengatur konsep ketatanegaraan formal [2].

Gagasan politik yang berupaya merancang bentuk sistem politik yang akan diterapkan di Indonesia telah muncul dan berkembang jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, yakni sekitar awal abad ke-20. Di dalamnya, termasuk pemikiran-pemikiran politik Islam [4]. Di Indonesia, wacana hubungan Islam dan negara semakin relevan karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sejak kemerdekaan, hubungan ini mengalami pasang surut, dipengaruhi oleh perubahan politik dan ideologi negara. Pada masa awal kemerdekaan, umat Islam memperjuangkan penerapan syariat dalam konstitusi, namun hal ini tidak sepenuhnya terakomodasi. Piagam Jakarta, yang awalnya mencantumkan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariat, akhirnya dihapuskan demi menjaga persatuan nasional. Keputusan ini mencerminkan

dilema politik Islam di Indonesia, di mana kepentingan keislaman sering kali harus disesuaikan dengan kebutuhan nasionalisme [5].

Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa Piagam Madinah, yang sering dianggap sebagai dasar negara Islam, sebenarnya lebih merupakan landasan bermasyarakat daripada dokumen pendirian negara. Dalam konteks ini, Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menegosiasikan nilai-nilai keislaman dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi nasional. Sjadzali menegaskan bahwa hubungan antara agama dan negara di Indonesia bersifat dinamis, bergantung pada perkembangan sosial dan politik masyarakat [5]. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Islam dan negara tidak hanya soal hukum formal, tetapi juga soal adaptasi terhadap konteks lokal.

Bahtiar Effendy menyatakan bahwa salah satu penyebab ketegangan antara Islam dan negara di Indonesia adalah pendekatan politik Islam yang cenderung formalistik dan legalistik. Pendekatan ini sering kali bertentangan dengan semangat pluralisme yang menjadi dasar negara. Menurut Effendy, transformasi hubungan ini membutuhkan reinterpretasi terhadap konsep politik Islam agar lebih sesuai dengan konteks demokrasi dan keberagaman di Indonesia [6]. Dalam pandangan ini, Islam tidak hanya berperan sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai sumber nilai yang mendukung harmoni sosial.

Sebaliknya, sejumlah pemikir menilai bahwa pemisahan antara agama dan negara justru menciptakan jarak antara umat Islam dan sistem pemerintahan. Menurut An-Na'im, pendekatan sekuler dalam politik dapat memarginalkan peran agama dalam kehidupan publik, termasuk dalam pengambilan kebijakan. Di Indonesia, hal ini terlihat dari kurangnya representasi nilai-nilai keislaman dalam beberapa aspek kebijakan negara. Namun, pandangan ini juga diimbangi oleh pendapat yang menyatakan bahwa sekularisme memberikan ruang bagi pluralisme dan kebebasan beragama [7].

Indonesia adalah contoh unik dalam hubungan antara Islam dan negara, karena negara ini tidak mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang lebih sering mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Pancasila, sebagai ideologi nasional, menawarkan kerangka yang memungkinkan umat Islam untuk berkontribusi tanpa mengorbankan keberagaman. Namun, penerimaan terhadap Pancasila sering kali menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, terutama mereka yang menginginkan penerapan syariat secara lebih formal [8]. Meskipun demikian, ada pandangan yang optimis terhadap hubungan Islam dan negara di Indonesia. Pandangan ini menekankan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan moral yang mendukung pembangunan bangsa. Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial, tanpa harus menjadi ideologi politik yang dominan. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai sumber inspirasi etika dan nilai-nilai universal yang mendukung kemajuan masyarakat [9].

Oleh karena itu, dinamika hubungan antara Islam dan negara di Indonesia merupakan refleksi dari perjuangan intelektual umat Muslim untuk menyeimbangkan identitas keislaman dengan kebutuhan kebangsaan. Perdebatan tentang konsep negara Islam dan negara nasionalis mencerminkan upaya umat Islam untuk menegosiasikan peran agama dalam kehidupan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia, dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara Islam dan negara serta implikasinya terhadap masa depan bangsa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dinamika hubungan Islam dan negara di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pemikiran politik Islam berdasarkan pengamatan terhadap karya-karya akademik, artikel, dan buku-buku yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemikiran, perdebatan utama, dan kontribusi literatur terhadap pemahaman hubungan antara Islam dan negara. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk menggali bagaimana pemikiran politik Islam berkembang di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi dinamika hubungan tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, yang menjadi metode utama. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber sekunder, termasuk buku-buku karya tokoh penting seperti Munawir Sjadzali, Bahtiar Effendy, dan Deliar Noer, yang memberikan pandangan mengenai hubungan Islam dan negara di Indonesia. Selain itu, artikel-artikel jurnal akademik yang membahas politik Islam, hubungan agama dan negara, serta konteks historis Indonesia juga menjadi bagian dari data yang

dikumpulkan. Laporan penelitian dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian ini turut diperhatikan untuk memperkaya analisis.

Sebagai langkah selanjutnya, penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan pertama adalah penyaringan data, yang dilakukan dengan menyaring informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan tema utama, yaitu hubungan Islam dan negara. Setelah itu, data yang telah disaring dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti sejarah politik Islam di Indonesia, perdebatan ideologis terkait penerapan syariat, serta pengaruh ideologi Pancasila terhadap pemikiran politik Islam. Langkah terakhir adalah sintesis data, yang dilakukan dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan pola, perbedaan, dan hubungan antara konsep-konsep utama yang terkait dengan tema penelitian.

Validitas penelitian dijaga dengan merujuk pada sumber-sumber akademik yang kredibel dan otoritatif. Untuk memastikan keakuratan informasi, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang ada dari berbagai referensi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari bias dan memberikan gambaran yang lebih objektif tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia. Meskipun penelitian ini menggunakan sumber sekunder, yang merupakan keterbatasan dalam hal data primer seperti wawancara atau observasi langsung, pemilihan sumber yang beragam dan terpercaya memungkinkan penelitian ini tetap memberikan analisis yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara di Indonesia telah melalui berbagai fase, dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, dan sosial. Pada awal kemerdekaan, umat Islam di Indonesia memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam konstitusi negara. Namun, karena kebutuhan untuk menjaga persatuan nasional dan keberagaman etnis serta agama, ide tersebut tidak sepenuhnya diterima. Piagam Jakarta, yang pada awalnya mengandung klausul mengenai kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat, akhirnya dihapus demi menciptakan kesepakatan yang lebih inklusif antara kelompok-kelompok bangsa yang beragam. Keputusan ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia dalam menyeimbangkan antara identitas agama dan kebutuhan kebangsaan.

Dalam perjalanan sejarahnya, wacana hubungan Islam dan negara di Indonesia terus berkembang. Sebagian besar umat Islam, terutama kelompok konservatif, menginginkan penerapan syariat Islam secara lebih formal dalam sistem pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa negara yang berdasarkan pada ajaran Islam akan lebih mampu mengatasi permasalahan sosial dan moral yang ada. Namun, ada pula pandangan yang menekankan bahwa Pancasila, sebagai ideologi negara, memberikan ruang bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip agama. Perdebatan ini mencerminkan adanya ketegangan antara aspirasi untuk mendirikan negara Islam dan keinginan untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara yang pluralis.

Sebagai bagian dari analisis, pemikiran Munawir Sjadzali mengenai Piagam Madinah menjadi penting dalam memahami hubungan antara Islam dan negara. Menurut Sjadzali, Piagam Madinah tidak dimaksudkan sebagai dasar negara, melainkan sebagai landasan untuk kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pemikiran ini menyarankan bahwa Islam dapat mengatur aspek moral dan etika kehidupan sosial tanpa harus mengubah struktur negara secara formal. Dalam konteks Indonesia, pandangan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan kerangka ideologi nasional Pancasila, yang mengedepankan pluralisme dan kebebasan beragama.

Sebaliknya, Bahtiar Effendy berpendapat bahwa ketegangan antara Islam dan negara di Indonesia disebabkan oleh pendekatan politik Islam yang sering kali bersifat formalistik dan legalistik. Pendekatan ini, menurut Effendy, cenderung bertentangan dengan semangat pluralisme yang menjadi dasar negara. Dalam pandangan ini, upaya untuk mengaitkan negara dengan hukum-hukum Islam secara langsung justru dapat memperburuk hubungan antara umat Islam dan negara. Sebagai solusi, Effendy menyarankan agar politik Islam lebih diarahkan pada pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera, tanpa harus terjebak dalam perdebatan formalistik mengenai bentuk negara.

Di sisi lain, beberapa pemikir berpendapat bahwa pemisahan antara agama dan negara justru memperburuk hubungan antara umat Islam dan sistem pemerintahan. Pendekatan sekuler yang diterapkan di Indonesia, yang memisahkan agama dari politik, telah menyebabkan marginalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan publik. Sebagai contoh, dalam beberapa kebijakan negara, terdapat kekurangan representasi dari

prinsip-prinsip Islam yang dianggap relevan untuk kehidupan sosial dan moral masyarakat. Meskipun demikian, pandangan ini juga diimbangi oleh pendapat yang menyatakan bahwa sekularisme memberikan ruang bagi pluralisme dan kebebasan beragama, yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Konflik antara nasionalisme dan ideologi Islam juga menjadi isu sentral dalam dinamika hubungan Islam dan negara di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila sering kali menjadi titik pertemuan antara kedua konsep tersebut. Sebagian umat Islam melihat Pancasila sebagai ideologi yang dapat diterima, karena ia mengakui keberagaman agama dan budaya. Namun, kelompok-kelompok yang lebih konservatif menganggap Pancasila sebagai penghalang bagi penerapan syariat Islam secara penuh. Hal ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat, di mana diskusi mengenai bentuk negara yang ideal terus berkembang.

Meskipun terdapat ketegangan ini, ada pandangan yang lebih optimis mengenai hubungan Islam dan negara di Indonesia. Sebagian besar pemikir menilai bahwa Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Islam, dalam hal ini, dipandang bukan sebagai ideologi politik yang harus mendominasi, tetapi sebagai sumber nilai yang mendukung kemajuan sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, peran Islam dalam negara dapat difokuskan pada aspek moral dan etika, tanpa harus mengubah struktur politik yang ada.

Di sisi lain, meskipun banyak yang berpendapat bahwa Islam dapat memberikan kontribusi moral dan sosial, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menegosiasikan peran agama dalam konteks negara yang pluralis. Pemikiran politik Islam di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui gerakan-gerakan tertentu, tetapi juga melalui interaksi antara agama, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemikiran politik Islam Indonesia harus terus berkembang, mengingat tantangan dan dinamika sosial-politik yang terus berubah. Pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara harus melibatkan berbagai perspektif, baik dari dalam umat Islam itu sendiri maupun dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat Indonesia.

Hasil dan pembahasan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor historis, ideologis, dan sosial. Ketegangan antara keinginan untuk mendirikan negara Islam dan penerimaan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam menyeimbangkan identitas agama dan kebangsaan. Perdebatan ini akan terus berlanjut, namun penting untuk menciptakan dialog yang inklusif agar dapat menemukan titik temu yang dapat memperkuat persatuan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia merupakan wacana yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Sejak awal kemerdekaan, umat Islam di Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan identitas keislaman dan menerima pluralisme sebagai fondasi kehidupan bernegara. Keputusan untuk tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara melalui penghapusan klausul Piagam Jakarta menunjukkan upaya untuk menjaga persatuan nasional dalam masyarakat yang majemuk.

Pancasila sebagai ideologi nasional telah menjadi kerangka yang memungkinkan hubungan antara Islam dan negara tetap harmonis meskipun tidak selalu bebas dari ketegangan. Pemikiran para tokoh seperti Munawir Sjadzali dan Bahtiar Effendy menegaskan bahwa Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk formalistik, tetapi dapat menjadi sumber nilai yang mendukung harmoni sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini membuka ruang bagi reinterpretasi politik Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas Indonesia yang pluralis.

Meskipun demikian, masih terdapat kelompok yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara lebih formal dalam sistem pemerintahan. Perbedaan pandangan ini menciptakan dinamika yang terus memengaruhi hubungan antara umat Islam dan negara. Di sisi lain, sekularisme yang diterapkan di Indonesia memberikan ruang bagi pluralisme dan kebebasan beragama, namun juga menimbulkan tantangan dalam merepresentasikan nilai-nilai keislaman dalam kebijakan negara. Dalam konteks global, pemikiran politik Islam di Indonesia mencerminkan keberagaman pendekatan terhadap hubungan agama dan negara. Indonesia menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, pemikiran politik Islam di Indonesia tidak hanya

penting bagi masyarakat lokal tetapi juga menjadi referensi bagi dunia internasional dalam memahami hubungan antara agama dan negara.

Kesimpulannya, dinamika hubungan Islam dan negara di Indonesia menggambarkan upaya umat Islam untuk menyeimbangkan identitas agama dengan kebutuhan kebangsaan. Tantangan dan perdebatan yang ada justru menjadi peluang untuk menciptakan sinergi antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip pluralisme, sehingga mampu memperkuat persatuan nasional dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. P. Putera, “Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Dari Formalistik Menuju ke Substantif,” *Ushuluddin dan Studi Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 1–68, Jan.–Jun. 2018.
- [2] A. An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- [3] M. R. Novriansyah, A. R. Abun, and Herwansyah, “Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Implikasinya terhadap Pluralitas di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ushuluddin dan Studi Islam*, vol. 21, no. 1, pp. 49–62, Jun. 2020.
- [4] M. F. Fikri, Zurkarnen, and N. Damanik, “Pemikiran Politik Islam M. Quraish Shihab di Indonesia: Sebuah Analisis,” *Islam & Contemporary Issues*, vol. 4, no. 1, pp. 1–7, 2024.
- [5] M. Sjadzali, *Islam and the National Ideology: Reinterpreting Islam in Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- [6] B. Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, Jakarta: PT Temprint, 1998.
- [7] R. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Princeton: Princeton University Press, 2000.
- [8] G. Barton, *Islam and the State in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002.
- [9] A. Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2004.